

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Pasundan No. 42 Telp. (0265) 633156 Kec. Cijulang
Kab. Pangandaran 46394

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 800/Kpts.0129-Dinkes/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 81);
49. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/2500.a/Kpts/Dinkes/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cijulang
Pada Tanggal 8 Januari 2024

Cijulang, 8 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep.,MM

NIP. 19660425 198503 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts.0129-Dinkes/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Penanggungjawab | : drg. Asep Kemal Pasha, Sp.KGA., MM |
| 2. Koordinator | : Nani Yuningsih, SKM |
| 3. Ketua | : dr. Rina Veriany |
| 4. Wakil Ketua | : Ervin Firmansyah, SKM |
| 5. Sekretaris | : Nana Sutisna, S.Kep.,Ners M.M |
| 6. Anggota | : Sri Hermawati, S.Kep.,Ners M.M
Hj. Srie Heryani N, S.Kep.,Msi |

Cijulang, 8 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep.,MM

NIP. 19660425 198503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Pasundan No. 42 Telp. (0265) 633156 Kec. Cijulang
Kab. Pangandaran 46394

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 800/Kpts. *224* -Dinkes/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah yang dimaksud pada pasal 11 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
 47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
 48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 81);
 49. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/2500.a/Kpts/Dinkes/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kesehatan di daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Dinas Kesehatan.
3. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 2021 sampai dengan 2026.
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Kesehatan
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan Dan Sasaran SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan
- 3.3. Program dan Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Dinas Kesehatan
 - 4.1. Program dan Kegiatan
 - 4.2. Pagu Indikatif
- V. Penutup
- Lampiran

BAB III
ISI DAN URAIAN KERJA
Pasal 3

Isi dan uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Cijulang, 29 Juli 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep.,MM
NIP. 19660425 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. Bertugas untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya, hal tersebut menjadi masukan dalam melakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan di tahun 2025.

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan ini kami telah mengupayakan sebaik mungkin walaupun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala yang dihadapi, namun besar harapan kami mudah-mudahan rencana kerja pada tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai langkah awal dalam pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Pangandaran. Upaya kesehatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Pada penyusunan rencana kerja ini, kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Cijulang, 29 Juli 2024

KERALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGANDARAN



YADI SUKMAYADI, S.Kep.,MM

NIP. 19660425 198503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	43
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	47
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	49
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	72
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	74
3.3. Program dan Kegiatan.....	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP	117
5.1. Catatan Penting Penyusunan Renja.....	117
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	117
5.3. Rencana tindak Lanjut Transparansi.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam pelaksanaan pembangunan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, diterjemahkan lebih spesifikasi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berpedoman kepada RKPD SKPD dan Renstra SKPD.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran logis untuk menyikapi isu-isu strategis yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap pertama persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahap persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan di tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Untuk menghasilkan perencanaan yang baik kami telah melakukan proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan, diawali dengan membentuk tim penyusun Renja SKPD Dinas Kesehatan yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota, merumuskan rancangan awal rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan, menganalisis gambaran pelayanan SKPD Dinas Kesehatan, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tahun lalu, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat, penyajian awal dokumen rancangan renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, penyempurnaan rancangan renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 81);
49. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/2500.a/Kpts/Dinkes/2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025.

Dengan tujuan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di tahun 2024 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran antara lain bertujuan:

1. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih,
2. Pembangunan SDM yang berkualitas, mandiri dan religius,
3. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing,
4. Mewujudkan pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan,
5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal,
6. Menciptakan pembiayaan pembangunan daerah yang kolaboratif.

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan,
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran,
3. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah,

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja SKPD terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kab/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dinas Kesehatan.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan.

Berisikan uraian tentang tingkat kinerja SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD Dinas Kesehatan.

Berisikan uraian tentang proses alasan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisi uraian tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan usulan tersebut mempunyai keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN.**
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan, rekapitulasi program/kegiatan serta penjelasan kesesuaian rumusan program/kegiatan dengan rancangan awal RKPD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN.**
Mengemukakan secara eksplisit rencana program/kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program/kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB V PENUTUP.**
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kesehatan dan Capaian Renstra SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2023

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan pada program dan kegiatan tahun 2023, secara keseluruhan dapat dilihat dengan capaian target kinerja yang terealisasi.

Untuk tahun anggaran tahun 2023 Dinas Kesehatan melaksanakan Kegiatan dengan Jumlah Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 341.803.813.503 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 280.864.653.890.

Adapun rincian program dan kegiatan Renja tahun lalu yang disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja RENSTRA/RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	18.000.000	31.259.000	173,66

b. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Puskesmas Padaherang	3.570.000.000	3.547.943.852	99,38
2	Puskesmas Sindangwangi	1.528.000.000	1.463.410.930	95,77
3	Puskesmas Mangunjaya	2.595.000.000	2.376.676.762	91,59
4	Puskesmas Kalipucang	3.538.000.000	3.153.473.414	89,13
5	Puskesmas Pangandaran	4.565.000.000	4.993.255.485	109,38
6	Puskesmas Sidamulih	1.563.000.000	1.496.510.816	95,75
7	Puskesmas Cikembulan	1.017.000.000	920.015.871	90,46
8	Puskesmas Parigi	3.200.000.000	3.036.189.712	94,88
9	Puskesmas Selasari	921.000.000	830.083.183	90,13
10	Puskesmas Cijulang	2.545.000.000	2.515.210.334	98,83
11	Puskesmas Cimerak	1.920.000.000	1.980.466.994	103,15
12	Puskesmas Legokjawa	1.983.000.000	1.966.514.898	99,17
13	Puskesmas Cigugur	2.180.000.000	2.082.136.580	95,51
14	Puskesmas Langkaplancar	2.245.000.000	2.463.093.330	109,71
15	Puskesmas Jadikarya	1.500.000.000	1.360.449.732	90,70
16	RSUD Pandega	60.000.000.000	85.970.728.841	143,28
	Jumlah	94.870.000.000	120.156.160.734	126,65

c. Target dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Puskesmas Padaherang	708.000.000	708.000.000	100,00
2	Puskesmas Sindangwangi	575.441.000	575.441.000	100,00

No	Uraian	Target	Realisasi	%
3	Puskesmas Mangunjaya	640.698.000	640.698.000	100,00
4	Puskesmas Kalipucang	699.505.000	699.505.000	100,00
5	Puskesmas Pangandaran	714.804.000	714.804.000	100,00
6	Puskesmas Sidamulih	585.655.000	585.655.000	100,00
7	Puskesmas Cikembulan	542.420.000	542.420.000	100,00
8	Puskesmas Parigi	695.000.000	695.000.000	100,00
9	Puskesmas Selasari	555.000.000	555.000.000	100,00
10	Puskesmas Cijulang	700.000.000	700.000.000	100,00
11	Puskesmas Cimerak	604.956.000	604.956.000	100,00
12	Puskesmas Legokjawa	620.000.000	620.000.000	100,00
13	Puskesmas Cigugur	610.000.000	610.000.000	100,00
14	Puskesmas Langkaplancar	645.495.000	645.495.000	100,00
15	Puskesmas Jadikarya	600.680.000	600.680.000	100,00
	Jumlah	9.497.654.000	9.497.654.000	100,00

d. Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	181.509.878.157	134.392.242.931	74,04
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.391.766.463	68.552.113.219	89,74
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.342.000	47.749.380	71,97
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.342.000	47.749.380	71,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.863.687.625	66.381.615.110	89,87
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.700.487.625	66.280.465.110	89,93
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.200.000	101.150.000	61,98
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	204.000.000	133.450.000	65,42
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	204.000.000	133.450.000	65,42
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.800.000	461.000.750	92,05
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.800.000	461.000.750	92,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.891.475	465.662.213	98,06
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.042.845	22.750.000	98,73
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.971.017	199.639.456	99,83
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24.931.960	99,73
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.980.000	99,87
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.877.613	203.360.797	95,98
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.770.000	4.715.000	98,85
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.770.000	4.715.000	98,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.112.976	416.910.318	65,85
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	283.425.828	173.705.318	61,29
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.687.148	233.205.000	68,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.162.387	641.010.448	99,51
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.725.000	198.464.640	99,87
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.250.000	50.172.500	99,85
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.187.387	392.373.308	99,29
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	99.121.577.606	64.689.254.922	65,26
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44.087.708.276	31.757.640.503	72,03
18	Pembangunan Puskesmas	4.071.100.000	2.306.028.944	56,64
19	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.951.373.000	3.646.056.723	92,27
20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	49.599.880	43.401.000	87,50
21	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.675.000.000	1.603.399.880	95,73
22	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	111.543.500	97.550.000	87,45
23	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.574.987.366	21.110.500.866	73,88
24	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	63.000.000	62.850.000	99,76
25	Pengadaan Obat, Vaksin	3.100.000.000	738.533.075	23,82
26	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.338.004.066	2.059.714.524	88,10
27	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	153.100.464	89.605.491	58,53
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.954.368.250	32.897.239.419	59,86
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	219.580.000	219.550.000	99,99
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	550.028.000	17.340.000	3,15
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.360.000	29.416.000	96,89
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	342.648.000	217.124.000	63,37
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.556.200	3.556.200	100,00
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	437.356.260	413.018.000	94,44
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.264.920	43.189.000	43,07
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	345.034.810	335.801.560	97,32
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	133.142.500	115.599.750	86,82
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	178.336.080	-	0,00
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.899.994.500	4.580.193.000	66,38
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	75.385.000	75.385.000	100,00
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	883.648.944	846.985.449	95,85
41	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	115.317.000	115.317.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
42	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	295.598.771	251.704.563	85,15
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	23.132.920	10.120.920	43,75
44	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	150.000.000	147.838.000	98,56
45	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	190.801.200	91.840.000	48,13
46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.421.261.665	24.199.027.235	59,87
47	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	150.000.000	147.580.000	98,39
48	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.971.872.381	708.874.520	23,85
49	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140.068.599	73.432.222	52,43
50	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	10.000.000	3.030.000	30,30
51	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	35.000.000	-	0,00
52	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	251.980.500	251.317.000	99,74
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.501.080	34.375.000	43,24
53	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	79.501.080	34.375.000	43,24
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.209.541.088	364.112.790	6,99
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.773.231.871	48.200.000	1,01
54	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4.723.392.871	20.000.000	0,42
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	49.839.000	28.200.000	56,58
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	436.309.217	315.912.790	72,41
56	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	436.309.217	315.912.790	72,41
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	415.822.000	415.822.000	100,00
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.726.000	63.726.000	100,00
57	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.726.000	63.726.000	100,00
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	223.893.500	223.893.500	100,00
58	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	223.893.500	223.893.500	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	128.202.500	128.202.500	100,00
59	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	128.202.500	128.202.500	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	371.171.000	370.940.000	99,94
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.850.000	104.850.000	100,00
60	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	104.850.000	104.850.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.321.000	266.090.000	99,91
61	Bimbingan Teknis, dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	266.321.000	266.090.000	99,91

e. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Padaherang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	4.589.296.042	4.377.903.557	95,39
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.660.296.042	3.553.533.521	97,08
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.621.693	42.621.692	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.621.693	42.621.692	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.617.674.349	3.510.911.829	97,05
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.617.674.349	3.510.911.829	97,05
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	682.830.000	640.450.036	93,79
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	7.790.400	64,92
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	7.790.400	64,92
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.830.000	632.659.636	94,31
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	182.520.000	179.465.000	98,33
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.860.000	255.000	13,71
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.805.000	47.780.000	99,95
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.800.000	4.800.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.440.000	4.440.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.280.000	5.280.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.100.000	2.100.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.280.000	-	-
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.270.000	34.240.000	99,91

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.000.000	33.000.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.780.000	11.780.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	114.951.800	114.900.000	99,95
16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.560.000	6.785.000	89,75
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.400.000	4.400.000	100,00
18	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52.125.200	50.660.000	97,19
19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.220.000	585.000	26,35
20	Operasional Pelayanan Puskesmas	150.108.000	123.144.636	82,04
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.130.000	5.130.000	100,00
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.200.000	3.915.000	93,21
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	221.000.000	158.750.000	71,83
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	221.000.000	158.750.000	71,83
23	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	221.000.000	158.750.000	71,83
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.170.000	25.170.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.170.000	25.170.000	100,00
24	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.170.000	25.170.000	100,00

f. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Sindangwangi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	2.281.328.686	2.168.976.763	95,08
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.586.787.686	1.520.435.794	95,82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.372.234	22.372.234	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.372.234	22.372.234	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.564.415.452	1.498.063.560	95,76
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.564.415.452	1.498.063.560	95,76
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	530.471.000	504.350.969	95,08
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.441.000	6.710.400	64,27
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10.441.000	6.710.400	64,27
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	520.030.000	497.640.569	95,69
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	102.090.000	101.985.000	99,90
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.900.000	41.900.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.060.000	2.060.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.440.000	6.440.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000	4.500.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.800.000	600.000	33,33
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34.770.000	34.745.000	99,93
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.000.000	22.000.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.735.000	15.735.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	65.575.000	62.605.000	95,47
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.100.000	6.100.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.600.000	6.600.000	100,00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59.720.000	59.635.000	99,86
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12.000.000	6.200.000	51,67
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	127.440.000	115.235.569	90,42
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.300.000	2.300.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.000.000	6.000.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	119.100.000	99.250.000	83,33
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	119.100.000	99.250.000	83,33
22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	119.100.000	99.250.000	83,33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	44.970.000	44.940.000	99,93
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.970.000	44.940.000	99,93
23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	44.970.000	44.940.000	99,93

g. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Mangunjaya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	3.803.980.067	3.465.684.320	91,11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.998.882.067	2.735.287.121	91,21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.872.465	33.872.465	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.872.465	33.872.465	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.965.009.602	2.701.414.656	91,11
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.965.009.602	2.701.414.656	91,11
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	584.298.000	540.747.199	92,55
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.923.000	5.472.000	45,89
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	11.923.000	5.472.000	45,89
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	572.375.000	535.275.199	93,52
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.180.000	42.940.000	70,19
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.400.000	2.400.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.390.000	11.260.000	78,25
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.860.000	6.860.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.440.000	4.440.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.400.000	4.400.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22.560.000	22.560.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.700.000	12.940.000	94,45
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.560.000	10.560.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	59.925.000	57.790.000	96,44
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.480.000	35.480.000	100,00
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.460.000	8.460.000	100,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.400.000	4.400.000	100,00
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.670.000	139.140.000	98,21
18	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	900.000	900.000	100,00
19	Operasional Pelayanan Puskesmas	138.750.000	131.265.199	94,61
20	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.640.000	5.640.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	22.560.000	22.560.000	100,00
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	14.100.000	11.280.000	80,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	164.400.000	133.250.000	81,05
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	164.400.000	133.250.000	81,05
23	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	164.400.000	133.250.000	81,05
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.400.000	56.400.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.400.000	56.400.000	100,00
24	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56.400.000	56.400.000	100,00

h. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Kalipucang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	4.816.052.000	4.273.919.171	88,74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.887.947.000	3.503.395.344	90,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.394.669	40.394.669	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.394.669	40.394.669	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.847.552.331	3.463.000.675	90,01
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.847.552.331	3.463.000.675	90,01
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	686.625.000	564.833.827	82,26
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	6.912.000	57,60
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	6.912.000	57,60

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674.625.000	557.921.827	82,70
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	109.380.000	89.505.000	81,83
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79.680.000	60.620.000	76,08
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.000.000	2.000.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.320.000	4.320.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.700.000	5.700.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.680.000	1.080.000	64,29
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.160.000	-	0,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.764.240	67.764.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.000.000	1.350.000	22,50
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.460.000	2.190.000	19,11
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	57.385.760	56.985.000	99,30
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.760.000	7.650.000	65,05
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.695.000	96.665.000	87,33
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.040.000	-	0,00
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.860.000	124.657.827	84,31
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.080.000	-	0,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	25.200.000	12.100.000	48,02
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	29.460.000	25.335.000	86,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	228.600.000	193.000.000	84,43
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	228.600.000	193.000.000	84,43
22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	228.600.000	193.000.000	84,43
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.880.000	12.690.000	98,52
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.880.000	12.690.000	98,52
23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.880.000	12.690.000	98,52

i. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Pangandaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	6.418.882.820	6.122.321.263	95,38
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.369.678.820	5.199.006.674	96,82
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.811.104	39.811.104	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.811.104	39.811.104	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.329.867.716	5.159.195.570	96,80

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.329.867.716	5.159.195.570	96,80
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	764.804.000	703.064.589	91,93
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.804.000	8.150.400	55,06
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	14.804.000	8.150.400	55,06
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	694.914.189	92,66
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	212.090.000	212.090.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.620.000	46.620.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.440.000	4.440.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	50.000.000	-	0,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.972.560	9.972.560	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.845.000	6.845.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	44.000.000	44.000.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000	15.600.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	129.512.440	129.512.440	100,00
13	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	240.000	240.000	100,00
14	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57.960.000	57.960.000	100,00
15	Operasional Pelayanan Puskesmas	151.510.000	146.484.189	96,68
16	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60.000	-	0,00
17	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.350.000	19.350.000	100,00
18	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000	1.800.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	284.400.000	220.250.000	77,44
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	284.400.000	220.250.000	77,44
19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	284.400.000	220.250.000	77,44

j. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Sidamulih

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	1.876.099.165	1.621.587.860	86,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.123.079.165	1.026.087.205	91,36
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.070.099	4.070.099	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.070.099	4.070.099	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.119.009.066	1.022.017.106	91,33
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.119.009.066	1.022.017.106	91,33
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	518.940.000	477.270.655	91,97
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.155.200	51,55
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10.000.000	5.155.200	51,55
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508.940.000	472.115.455	92,76

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.830.000	66.830.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.900.000	1.900.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	175.000	175.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.840.000	2.840.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.700.000	4.700.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.325.000	4.325.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.550.000	14.550.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.600.000	-	0,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.400.000	7.520.000	80,00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.997.000	40.997.000	100,00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.640.000	5.640.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.100.000	3.100.000	100,00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	207.710.000	207.710.000	100,00
17	Operasional Pelayanan Puskesmas	121.088.000	92.743.455	76,59
18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.120.000	9.120.000	100,00
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	9.965.000	9.965.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	210.600.000	94.750.000	44,99
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	210.600.000	94.750.000	44,99
20	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	210.600.000	94.750.000	44,99
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.480.000	23.480.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.480.000	23.480.000	100,00
21	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.480.000	23.480.000	100,00

k. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Cikembulan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	2.752.878.394	2.527.505.917	91,81
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.821.623.394	1.755.124.349	96,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.307.447	32.307.447	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.307.447	32.307.447	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.789.315.947	1.722.816.902	96,28
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.789.315.947	1.722.816.902	96,28
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	576.520.000	568.746.568	98,65
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	5.025.600	41,88
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	5.025.600	41,88
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	564.520.000	563.720.968	99,86

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.220.000	52.220.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.575.000	8.575.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	680.000	680.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.440.000	4.440.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.920.000	4.920.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.220.000	2.220.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.040.000	2.040.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.350.000	16.350.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.500.000	5.500.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.930.000	28.930.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37.317.000	37.317.000	100,00
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.740.000	13.740.000	100,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.860.000	1.860.000	100,00
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	241.223.000	241.223.000	100,00
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.810.000	128.010.968	99,38
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000	960.000	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.815.000	9.815.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.920.000	4.920.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	345.600.000	194.500.000	56,28
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	345.600.000	194.500.000	56,28
22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	345.600.000	194.500.000	56,28
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.135.000	9.135.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.135.000	9.135.000	100,00
23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.135.000	9.135.000	100,00

I. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Parigi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	4.298.970.047	4.059.404.116	94,43
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.402.670.047	3.210.093.611	94,34
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.291.129	57.291.129	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.291.129	57.291.129	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.345.378.918	3.152.802.482	94,24
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.345.378.918	3.152.802.482	94,24
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	667.479.000	654.039.505	97,99

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	7.516.800	62,64
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	7.516.800	62,64
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	655.479.000	646.522.705	98,63
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	117.090.000	117.090.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.240.000	12.240.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.260.000	19.260.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.325.000	5.325.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.440.000	3.440.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.800.000	8.800.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.200.000	11.200.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.520.000	2.520.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.560.000	21.560.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.000.000	33.000.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.581.000	32.581.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	129.879.000	129.879.000	100,00
16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.590.000	17.590.000	100,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.800.000	8.800.000	100,00
18	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45.550.000	45.550.000	100,00
19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.275.000	4.275.000	100,00
20	Operasional Pelayanan Puskesmas	149.169.000	140.212.705	94,00
21	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.300.000	3.300.000	100,00
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.640.000	5.640.000	100,00
23	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.260.000	24.260.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	201.300.000	167.750.000	83,33
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	201.300.000	167.750.000	83,33
24	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	201.300.000	167.750.000	83,33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.521.000	27.521.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.521.000	27.521.000	100,00
25	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.521.000	27.521.000	100,00

m. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Selasari

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	1.706.043.013	1.448.756.805	84,92
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	990.843.013	889.881.726	89,81

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.489.077	3.489.077	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.489.077	3.489.077	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	987.353.936	886.392.649	89,77
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	987.353.936	886.392.649	89,77
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	533.836.600	467.711.679	87,61
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	7.344.000	73,44
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10.000.000	7.344.000	73,44
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	523.836.600	460.367.679	87,88
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	126.150.000	104.870.000	83,13
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.200.000	-	0,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.500.000	28.500.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.200.000	4.200.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.440.000	4.440.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.920.000	10.920.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.765.000	4.245.000	62,75
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.520.000	-	0,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.560.000	13.560.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.000.000	33.000.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.140.000	7.140.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	115.290.100	115.290.100	100,00
16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.425.000	360.000	25,26
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.112.500	30.144.500	93,87
18	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	170.000	-	0,00
19	Operasional Pelayanan Puskesmas	123.239.000	99.493.079	80,73
20	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	285.000	285.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.920.000	3.920.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	160.200.000	70.000.000	43,70
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	160.200.000	70.000.000	43,70
22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	160.200.000	70.000.000	43,70
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.163.400	21.163.400	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.163.400	21.163.400	100,00
23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.163.400	21.163.400	100,00

n. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Cijulang

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	3.750.231.965	3.637.284.074	96,99
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.873.231.965	2.809.504.286	97,78
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.866.401	43.866.401	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.866.401	43.866.401	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.829.365.564	2.765.637.885	97,75
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.829.365.564	2.765.637.885	97,75
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	676.268.600	656.548.388	97,08
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.952.000	8.700.000	72,79
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	11.952.000	8.700.000	72,79
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.316.600	647.848.388	97,52
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.490.000	48.490.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.800.000	1.800.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41.680.000	41.680.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.485.000	1.485.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.970.000	2.970.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	880.000	880.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.040.000	-	0,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.630.000	33.220.000	98,78
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.840.000	15.840.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.240.000	5.239.920	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	72.071.600	72.071.600	100,00
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.675.000	6.675.000	100,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.000.000	6.000.000	100,00
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	263.680.000	259.580.000	98,45
18	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.160.000	-	0,00
19	Operasional Pelayanan Puskesmas	148.900.000	141.611.868	95,11
20	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	740.000	740.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.230.000	9.230.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	805.000	335.000	41,61
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	177.000.000	147.500.000	83,33
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	177.000.000	147.500.000	83,33
23	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	177.000.000	147.500.000	83,33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.731.400	23.731.400	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.731.400	23.731.400	100,00
24	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.731.400	23.731.400	100,00

o. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Cimerak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	2.989.304.732	2.795.612.054	93,52
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.121.548.732	2.033.964.475	95,87
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.620.090	26.620.090	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.620.090	26.620.090	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.094.928.642	2.007.344.385	95,82
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.094.928.642	2.007.344.385	95,82
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	565.944.000	560.386.299	99,02
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.880.000	7.358.400	61,94
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	11.880.000	7.358.400	61,94
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	554.064.000	553.027.899	99,81
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	156.870.000	156.870.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.440.000	40.440.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.040.000	5.040.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.360.000	5.360.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.080.000	2.080.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	570.000	570.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	45.115.000	45.115.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.500.000	16.500.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.275.000	15.275.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.002.000	54.001.280	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.110.000	3.110.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.360.000	1.360.000	100,00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	56.155.000	56.155.000	100,00
17	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.002.000	130.966.619	99,22
18	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	675.000	675.000	100,00
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.280.000	2.280.000	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	17.230.000	17.230.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	262.800.000	162.250.000	61,74
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	262.800.000	162.250.000	61,74
21	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	262.800.000	162.250.000	61,74
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	39.012.000	39.011.280	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.012.000	39.011.280	100,00
22	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39.012.000	39.011.280	100,00

p. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Legokjawa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	3.005.129.952	2.749.949.637	91,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.184.429.952	2.053.181.777	93,99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.495.448	21.495.448	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.495.448	21.495.448	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.162.934.504	2.031.686.329	93,93
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.162.934.504	2.031.686.329	93,93
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	578.036.924	547.054.860	94,64
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	5.486.400	45,72
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	5.486.400	45,72
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.036.924	541.568.460	95,68
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186.585.000	186.585.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.200.000	100.000	8,33
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.080.000	14.080.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.995.000	1.995.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.560.000	4.560.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.780.000	3.780.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.740.000	4.740.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.040.000	-	0,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.390.000	11.390.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.120.000	9.120.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.710.000	10.710.000	100,00
15	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	47.772.924	47.772.924	100,00
16	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.160.000	32.600.000	90,15
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.260.000	1.260.000	100,00
18	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.610.000	74.610.000	100,00
19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.420.000	3.420.000	100,00
20	Operasional Pelayanan Puskesmas	134.764.000	117.625.536	87,28
21	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.260.000	630.000	50,00
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	14.130.000	14.130.000	100,00
23	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.460.000	2.460.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200.700.000	107.750.000	53,69
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200.700.000	107.750.000	53,69
24	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	200.700.000	107.750.000	53,69
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	41.963.076	41.963.000	100,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.963.076	41.963.000	100,00
25	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.963.076	41.963.000	100,00

q. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Cigugur

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	3.468.594.850	3.166.741.251	91,30
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.657.894.850	2.426.786.200	91,30
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.067.617	18.067.617	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.067.617	18.067.617	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.639.827.233	2.408.718.583	91,25
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.639.827.233	2.408.718.583	91,25

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	596.760.000	581.045.051	97,37
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	4.094.000	34,12
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	4.094.000	34,12
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	584.760.000	576.951.051	98,66
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.540.000	13.540.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.560.000	10.560.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.880.000	22.880.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.640.000	3.640.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.480.000	3.480.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.130.000	4.130.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.040.000	2.040.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.881.000	12.281.000	68,68
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	22.000.000	22.000.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.690.000	14.690.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.070.000	60.070.000	100,00
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.240.000	5.240.000	100,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.320.000	1.320.000	100,00
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	259.606.000	258.860.000	99,71
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.473.000	131.010.051	98,90
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	960.000	960.000	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.280.000	5.280.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.970.000	4.970.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	200.700.000	146.000.000	72,75
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200.700.000	146.000.000	72,75
22	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	200.700.000	146.000.000	72,75
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.240.000	12.910.000	97,51
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.240.000	12.910.000	97,51
23	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.240.000	12.910.000	97,51

r. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Langkaplancar

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	3.504.165.357	3.372.675.148	96,25
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.070.357	2.587.991.147	99,19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.500.659	14.500.659	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.659	14.500.659	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.594.569.698	2.573.490.488	99,19
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.594.569.698	2.573.490.488	99,19
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	617.605.000	614.044.001	99,42
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	11.676.600	97,31
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	12.000.000	11.676.600	97,31
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	605.605.000	602.367.401	99,47
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.970.000	97.970.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34.120.000	34.120.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.990.000	2.990.000	100,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.540.000	3.540.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.620.000	1.620.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.310.000	5.310.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.040.000	2.040.000	100,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	18.105.000	18.105.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.500.000	5.500.000	100,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.931.000	9.931.000	100,00
14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	31.529.800	31.529.800	100,00
15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.340.000	6.340.000	100,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.440.000	4.440.000	100,00
17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	234.413.200	234.413.200	100,00
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	139.056.000	135.818.401	97,67
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.620.000	1.620.000	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.985.000	2.985.000	100,00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.095.000	4.095.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	249.600.000	142.750.000	57,19
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	249.600.000	142.750.000	57,19
25	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	249.600.000	142.750.000	57,19
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.890.000	27.890.000	100,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.890.000	27.890.000	100,00
26	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.890.000	27.890.000	100,00

s. Target dan Realisasi Anggaran Puskesmas Jadikarya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	2.296.066.171	2.096.620.177	91,31
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.625.786.171	1.485.951.200	91,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.816.200	2.816.200	100,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.816.200	2.816.200	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.622.969.971	1.483.135.000	91,38
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.622.969.971	1.483.135.000	91,38
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	575.870.000	532.308.977	92,44
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	5.126.400	51,26
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	10.000.000	5.126.400	51,26
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	565.870.000	527.182.577	93,16
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.540.000	60.540.000	100,00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.530.000	22.530.000	100,00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.700.000	850.000	50,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.560.000	4.560.000	100,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.720.000	3.720.000	100,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.800.000	4.800.000	100,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.160.000	720.000	33,33
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.560.000	10.560.000	100,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.580.000	1.920.000	74,42
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	51.332.000	43.760.000	85,25
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.630.000	2.610.000	71,90
15	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	258.650.000	253.460.000	97,99
16	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	60.000	-	0,00
17	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.193.000	109.747.577	83,65
18	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	930.000	930.000	100,00
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.695.000	2.695.000	100,00
20	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.230.000	3.780.000	89,36

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	69.600.000	54.250.000	77,95
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	69.600.000	54.250.000	77,95
21	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	69.600.000	54.250.000	77,95
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.810.000	24.110.000	97,18
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.810.000	24.110.000	97,18
22	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.810.000	24.110.000	97,18

t. Target dan Realisasi Anggaran RSUD Pandega Pangandaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	108.736.912.085	98.587.468.846	90,67
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95.358.431.647	88.802.742.788	93,13
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	582.775.530	582.775.530	100,00
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	582.775.530	582.775.530	100,00
	Peningkatan Pelayanan BLUD	94.775.656.117	88.219.967.258	93,08
2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	94.775.656.117	88.219.967.258	93,08
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.378.822.438	8.787.756.558	70,99
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.681.962.102	8.560.588.222	80,14
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.800.000.000	3.678.626.120	63,42
4	Pengadaan Obat, Vaksin	1.698.299.115	1.698.299.115	100,00
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.183.662.987	3.183.662.987	100,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.669.360.336	199.668.336	11,96
6	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.571.501.736	193.509.736	12,31
7	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	97.858.600	6.158.600	6,29
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	27.500.000	100,00
8	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	27.500.000	27.500.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	999.658.000	996.969.500	99,73

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	999.658.000	996.969.500	99,73
9	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	999.658.000	996.969.500	99,73

Sedangkan untuk kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun bejalan yang sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kesehatan dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pangandaran**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90%		90%			90%		
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90%		90%			90%		
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90%		90%			90%		
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90%		90%			90%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90%		90%			90%		
	Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	90%		90%			90%		
	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90%		90%			90%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 %		100%			100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1250 orang		1008 Orang	1008 Orang	100 %	1050 orang	0 Orang	0 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	0 Orang	0 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %		100%			100%		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	0 Orang	0 %
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100 %		100%			100%		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 orang		0 Orang	0 Orang	0 %	0	0 %	0 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100%			100%		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	0 Orang	0 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	0,9		90 %			90 %		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	0 Jenis	0 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	110000 lembar/25 Buah	45 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	35 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	55 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90%		90%			90%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	22 unit					22 unit	0 Unit	0 %
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket					20 jenis/item	0 Unit	0 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit		70 jenis/item			70 jenis/item	36 Unit	36 Unit
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit					1 unit	0 Unit	0 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit					2 unit	0 Unit	0 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit		3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	0 Unit	0 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%		90%			90%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	100 %	3 laporan	3 laporan	75 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	75 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%		90%			90%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 unit		100 unit	30 Unit	30 %	100 unit	40 Unit	60 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 jenis/item		10 jenis/item	10 jenis/item	100 %	10 jenis/item	8 Unit	50 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit		3 unit	3 unit	100 %	3 unit	2 Unit	55 %
Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Persentase capaian SPM Kesehatan 2. Persentase capaian SPM Rumah Sakit	2 dokumen					1 dokumen		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	100 %	16 Unit Kerja	0 Dokumen	0 %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90 %		90 %			90 %		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %		90 %			90 %		
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	5 unit		5 unit	1 Unit	25 %	5 unit	1 Unit	20 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	5 unit		5 unit	1 Unit	25 %	3 unit	0 unit	0 %
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang di kembangkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	0 unit	0 %
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Farmasi yang Dibangun	14 unit					14 unit	0 unit	0 %
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dengan penambahan/pengembangan	3 unit					3 unit	0 unit	0 %
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab	4 unit					4 unit	0 unit	0 %
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang direhab	3 unit		3 unit	3 unit	100 %	3 unit	0 unit	0 %
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipelihara	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	0 Paket	33 %
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	16 jenis/item		16 jenis/item	16 jenis/item	100 %	16 jenis/item	10 Jenis	60 %
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat medik lainnya yang disediakan	72 jeis/item		35 Unit	35 Unit	100 %	35 Unit	12 Unit	28 %
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang beli	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	0 Paket	0 %
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat/vaksin yang disediakan	249 jenis/item		120 Item	120 Item	100 %	120 Item	15 item	35 %
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BHP yang disediakan	243 jenis/item		250 item/jenis	250 item/jenis	100 %	250 item/jenis	100 item	71 %
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang menerima distribusi	15 Puskesmas		15 Puskesmas	15 Puskesmas	100 %	15 Puskesmas	15 Puskesmas	30 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %		90 %			90 %		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8 dokumen		6244 orang	6244 orang	100 %	6244 orang	693 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600 orang		5960 orang	5960 orang	100 %	5960 orang	662 Orang	75 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 dokumen		5676 orang	5676 orang	100 %	5676 orang	630 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 dokumen		22638 orang	22638 orang	100 %	22638 orang	2515 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal dan usia (6-18 tahun) mendapatkan pelayanan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala	87000 org		83426 orang	83426 orang	100 %	83426 orang	9269 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta pelayanan kesehatan pada usia produktif	255387 Orang					255387 Orang	28376 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	5 dokumen		87152 orang	87152 orang		87152 orang	9683 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah peserta pelayanan hipertensi	100 peserta					55 orang	0 orang	0 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		100 peserta					55 Peserta	0 Peserta	0 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pasien ODGJ	410 orang		450 Orang	450 Orang	100 %	450 Orang	50 Orang	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis	500 orang		366 Orang	366 Orang	100 %	366 Orang	0 Orang	0 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan terinfeksi HIV	60 orang		60 orang	60 orang	100 %	60 orang	0 orang	0 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang dilayani pada kondisi KLB	67 orang		53 orang	53 orang	100 %	53 orang	6 Orang	80 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen status gizi masyarakat dan mensinergiskan lintas program dan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi di masyarakat	6 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dokumen	2 Dokumen	50 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen pelayanan Tes Kebugaran dan Pelayanan Kesehatan Kerja	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	0 dokumen	0 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Umum, Penduduk, dan sarana sanitasi lainnya yang memenuhi syarat kesehatan	7 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100 %	7 dokumen	4 Dokumen	80 %
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen preventif dan promotif kesehatan yang dihasilkan	16 dokumen		25 dokumen	25 dokumen	100 %	25 dokumen	15 Dokumen	75 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah peserta pelayanan akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	152 orang					100 orang	0 orang	0 %
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah peserta pelayanan diabetes melitus	1678 orang		1503 Orang	1503 Orang	100 %	1503 Orang	167 Orang	70 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang diskriminasi kesehatan jiwa dan NAFZA	75 Orang		75 Orang	75 Orang	100 %	75 Orang	10 Orang	60 %
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah tenaga kesehatan dalam upaya kesehatan khusus	125 orang		5 dokumen	5 dokumen	100 %	5 dokumen	3 Dokumen	90 %
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah peserta tenaga kesehatan yang andil pasca krisis	165 peserta					165 peserta	0 peserta	0 %
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen penyakit menular yang dihasilkan	23 dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	9 Dokumen	7 Dokumen	80 %
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	209874 orang		172664 Orang	172664 Orang	100 %	172664 Orang	19184 Orang	70 %
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan pengambilanspesimen penyakit potensial KLB	4 kali		4 Kali	4 Kali	100 %	4 Kali	0 Kali	0 %
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah laporan kegiatan koordinasi Tim Pembina Kabupaten Pangandaran Sehat untuk efektivitas program/kegiatan Forum Kabupaten Pangandaran Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	326664 orang		20660 Orang	20660 Orang	100 %	20660 Orang	3629 Orang	75 %
Operasional Pelayanan Rumah Sakit									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah petugas farmasi	5230 orang		2524 orang	2524 orang	100 %	2524 orang	0 orang	0 %
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah inserta awal diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)								
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kewaspadaan yang dilakukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah sistem SPGDT yang dikelola	3 PKM		16 unit	16 unit	100 %	16 unit	16 Unit	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang dikelola			18 fasilitas			18 fasilitas		
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kesehatan						25 dokumen	0 dokumen	0 %
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang tersedia						18 unit	0 unit	0 %
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan Internet yang disediakan						100 unit	0 unit	0 %
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	17 fasilitas		17 fasilitas			17 fasilitas		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Izin fasyankes yang diterbitkan	40 fasyankes		40 fasyankes	40 fasyankes	100 %	40 fasyankes	0 Fasyankes	0 %
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes rujukan yang ditingkatkan	40 fasyankes					40 fasyankes	0 fasyankes	0 %
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100 %	4 Unit	0 Unit	0 %
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90%			90%		
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin praktek nakes yang diterbitkan	250 orang		150 orang			150 orang		
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah praktek nakes yang berizin	250 orang					150 orang	0 orang	0 %
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen					1 dokumen	0 dokumen	0 %
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase distribusi SDM Kesehatan			100%			100%		
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan sesuai standar	1211 Orang		1211 Orang	1211 Orang	100 %	1211 Orang	1211 Orang	75 %
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen rencana kerja & tindak lanjut Bidang Keperawatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	0 Dokumen	0 %
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kompetensi teknis	359 orang		150 orang			150 orang		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terampil tentang pelatihan tertentu	359 orang		150 Orang	150 Orang	100 %	150 Orang	100 Orang	75 %
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90%		90%			90%		
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	166 unit		80 unit			80 unit		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Jumlah alat kesehatan dan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan	17 unit					8 Unit	0 Unit	0 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar perizinan	149 unit		72 Unit	72 Unit	100 %	72 Unit	50 Unit	80 %
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam Pemenuhan Komitmen Izin	50 Unit					50 Unit	0 Unit	0 %
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah rekomendasi sertifikat produksi pangan industri yang diterbitkan	220 sertifikasi		150 sertifikat			150 sertifikat		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana yang mendapatkan Sertifikat Produk industri Rumah Tangga Pangan (PIRT-P)	220 sertifikasi		150 sertifikat	150 sertifikat	100 %	150 sertifikat	130 Sertifikat	80 %
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah rekomendasi sertifikat higiene sanitasi TPM yang diterbitkan	50 sertifikat laik higiene		2 dokumen 50 sertifikat			2 dokumen 50 sertifikat		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Jumlah sertifikat laik higiene yang diterbitkan 2. Jumlah TPM, Depot Air Minum, Jasa Boga, dan Restoran yang mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	50 sertifikat laik higiene					50 sertifikat laik higiene	0 sertifikat laik higiene	0 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah sarana pangan jajanan yang dilakukan pengawasan higiene sanitasi	45 sarana		45 sarana			45 sarana		
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah sarana pangan jajanan yang dilakukan pengawasan higiene sanitasi	45 sarana					45 sarana	0 Sarana	0 %
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan post market PIRT yang dilakukan	75 sarana		75 sarana			75 sarana		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang diperiksa ulang dan dilakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di Kabupaten Pangandaran	75 sarana		75 sarana	75 sarana	100 %	75 sarana	0 Sarana	0 %
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Kegiatan Tindak lanjut dari hasil pengawasan pangan	2 dokumen					2 dokumen	0 Dokumen	0 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat/kelompok masyarakat di bidang kesehatan yang diberdayakan	90%		90%			90%		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pemberdayaan yang dilakukan	200 orang		1530 orang			1530 orang		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta Advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	200 orang		1530 orang	1530 orang	100 %	1530 orang	170 Orang	75 %
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sehat yang dilakukan	2 dokumen		15 Puskesmas			15 Puskesmas		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen promkes dan GHBS	2 dokumen		15 Pukesman	15 Pukesman	100 %	15 Pukesman	0 Puskesmas	0 %
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah peserta bimtek UKBM	500 Orang		500 Orang			500 Orang		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta bimtek UKBM	500 Orang		500 Orang	500 Orang	100 %	500 Orang	0 Orang	0 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran bahwa SKPD Dinas Kesehatan adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang kesehatan. Indikator kinerja pelayanannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta tata kerja unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, mampu berdaya saing serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum perubahan RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	SPM	IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Rumah Sehat		√	81%	83%	85%	87%	89%	84,7%	87,3%			
2	Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)		√	70%	80%	90%	100%	100%	98,92%	100%			
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	√	√	67,79	65,57	48,38	46,15	45,45	71,42	18,62			
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	√	√	6,84	6,5	6,17	5,84	5,5	6,25	7,08			
5	Prevalensi Stunting		√	5%	4,7%	4,4%	4,1%	3,8%	2,49%	1,93%			
6	Indeks Keluarga Sehat		√	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	0,8%	0,11%	0,143			
7	Indeks Kepuasan Masyarakat		√	>62,5	>62,5	>62,5	>62,5	>62,5	88,51	88,81			
8	Capaian SPM	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	86,31%	94,35			
9	Akreditasi Fasyankes		√	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Utama	Paripurna			
10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri		√	50%	50%	60%	65%	70%	67,74%	67,74%			
11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan		√	67.25 - 69.00	69.25 - 72.00	72.25 - 76.00	76.25 - 81.00	81.25 - 85.00	60,85	66,65			

Tabel 3.1

**Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Berdasarkan IKU
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023**

No	Sasaran			Satuan	Target
	Uraian		Indikator		
1	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	1	Persentase Rumah Sehat	%	83
		2	Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	%	80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	65,54
		4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,5
		5	Prevalensi Stunting	%	4,7
		6	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,12
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	>62,5
		8	Capaian SPM	%	100
		9	Akreditasi Fasyankes	predikat	Utama
3	Meningkatnya budaya sehat	10	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	50
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
4	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	11	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	Nilai/Poin	69,25 - 72,00

SPM merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi administratif, diberhentikan selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran yang sesuai dalam SPM Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

3.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna NAPZA, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

3.3.2. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM

1. Penerima Pelayanan Dasar

No	Penerima Pelayanan	Target
1	Ibu Hamil	100 %
2	Ibu Bersalin	100 %
3	Bayi Baru Lahir	100 %
4	Balita	100 %
5	Anak usia pendidikan dasar	100 %
6	WNI usia 15-59 tahun	100 %
7	WNI usia 60 tahun ke atas	100 %
8	Penderita Hipertensi	100 %
9	Penderita Diabetes Melitus	100 %
10	Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ)	100 %
11	Penderita TB	100%
12	Orang yang beresiko terinfeksi HIV	100 %

2. Capaian Kinerja Tahun 2023

a. Persentase Rumah Sehat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Sehat	83%	87,3%	105,18%

b. Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	80%	100,00%	125%

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	65,57 per 100.000 KH	18,62 per 100.000 KH	171,60%

d. Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Bayi (AKB)	6,5 per 1.000 KH	7,08 per 1.000 KH	91,07%

e. Prevalensi Stunting

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	4,7%	1,93%	158,94%

f. Indeks Keluarga Sehat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keluarga Sehat	0,12	0,143	119,17%

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	>62,5	88,81	100%

h. Capaian SPM

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Capaian SPM	100%	94,35%	94,35%

i. Akreditasi Fasyankes

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Akreditasi Fasyankes	Utama	Paripurna	100%

j. Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	50%	67,74%	135,48%

k. Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	69.25 - 72.00	66,65	96,25%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran antara lain:

- Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kesehatan sebagaimana dikemukakan, maka dapat disampaikan isu strategis sebagai berikut :
- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
- d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- e. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- f. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- g. Belum optimalnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
- h. Belum optimalnya Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (Belum memiliki RSUD)
- i. Belum terpenuhinya jumlah jenis kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- j. Ancaman Bencana Alam, bencana buatan manusia termasuk Global Warming yang berdampak pada kesehatan masyarakat
- k. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum optimal berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- l. Ketersediaan data yang relatif masih belum diimbangi dengan hasil kajian dan analisis.
- m. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- n. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- o. Desentralisasi (penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah), penyakit *new emerging disease*, reformasi dan demokratisasi, dinamika politik nasional, krisis ekonomi dan keterbatasan dana pemerintah, pengurangan anggaran pusat, deregulasi diberbagai perijinan dan bidang pembangunan, masih lemahnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- p. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam kurun waktu 4 tahun mengalami penurunan dan juga kenaikan disesuaikan dengan pengaruh dan pelacakan di lapangan.
- q. Penanganan kasus/prevalensi gizi buruk sudah seluruhnya ditangani tetapi belum berkesinambungan.
- r. Intensitas penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*). Diluar sasaran, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (*new emerging* dan *re-emerging*) serta kejadian luar biasa.
- s. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, *stake holder*, aparaturn pemerintah dalam mempraktekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- t. Belum optimumnya pemenuhan dan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar.
- u. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, bencana buatan manusia termasuk *Global Warming* yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
- v. Belum terkoordinasinya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam menunjang Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki, yang berpengaruh pada Rencana Kerja pada tahun 2025 antara lain :

- a. Pemenuhan kebutuhan akan anggaran alat kesehatan RSUD Kabupaten Pangandaran.
- b. Pemenuhan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana RSUD Kabupaten Pangandaran.
- c. Adanya efisiensi dan rasionalisasi di beberapa kegiatan.
- d. Penambahan anggaran untuk kegiatan jaminan kesehatan daerah.
- e. Pemenuhan kebutuhan alat kesehatan Puskesmas yang baru dibangun.
- f. Pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas yang baru dibangun.
- g. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
1. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
3. Masih dalam proses pencapaian sarana kesehatan yang memenuhi standar akreditasi sesuai dengan aturan yang ada.

Dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah *good governance*, desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dalam menyikapi isu-isu dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD tersebut, terdapat beberapa strategi bidang Kesehatan yang mengacu pada strategi pembangunan bidang kesehatan. Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pangandaran, maka diperlukan beberapa strategi pembangunan yaitu :

1. Pemenuhan jumlah, kompetensi dan sebaran sumber daya manusia kesehatan dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, berkualitas.
3. Mewujudkan UKBM yang berkualitas.
4. Penguatan Kemitraan & kerjasama LS.
5. Meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).
6. Advokasi.
7. Pengoptimalan manajemen kesehatan.
8. Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
9. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, Tahap awal penyusunan Rencana Kerja pada suatu SKPD dimulai dari proses persiapan penyusunan. Penyusunan Renja ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Tahun 2021 dengan fokus utama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Tahap kedua penyusunan rancangan Renja memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target

disesuaikan dengan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder. Dalam pelaksanaan forum gabungan mengikut sertakan beberapa pemangku kepentingan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah.

Berdasarkan Penelaahan Rancangan Awal RKPD, untuk program dan kegiatan yang bersifat non urusan sepenuhnya menjadi kewenangan SKPD Dinas Kesehatan yang disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing bidang maupun kesekretariatan di Dinas Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), ada 5 program yaitu: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun program dan kegiatan di Dinas Kesehatan secara keseluruhan menunjang dan melakukan peningkatan terhadap pelayanan kesehatan baik itu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan memberikan hasil yang optimal menuju pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas kepala daerah membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit, hal ini disiasati dengan melakukan permohonan pengajuan bantuan keuangan baik itu bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat.

Beberapa kegiatan yang diusulkan dari bantuan keuangan provinsi diantaranya kegiatan; Pembangunan Puskesmas Sindangwangi, Pembangunan Puskesmas Sidamulih, Pembangunan Puskesmas Selasari, Pembangunan Puskesmas Jadikarya, Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Luar Kuota Jamkesmas, Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit, dan Pengadaan Alat Kesehatan Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran. Pengajuan bantuan keuangan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya kegiatan; Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas/Penambahan Ruang Puskesmas, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Instalasi Farmasi, Penyediaan Obat, Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai, Pengadaan Catridge TCM, Pengadaan BMHP Malaria, Pengadaan Posbindu Kit, Pengadaan Alat Labkesda, Penguatan Pelayanan Ibu dan Anak Puskesmas PONEK, Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK. Hal ini dapat dilihat pada Tabel T.C-31 (terlampir)

Review Ranwal RKPD

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS KESEHATAN				418.785.600.000		DINAS KESEHATAN				385.153.764.000	
	DINAS KESEHATAN				235.927.600.000		DINAS KESEHATAN				201.897.764.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				235.927.600.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				201.897.764.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90 %	130.283.000.000		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90 %	110.892.991.670	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %	60.650.000.000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %	47.706.970.670	
1	Pembangunan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	10.000.000.000	1	Pembangunan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	6.000.000.000	
2	Pengembangan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	5.000.000.000	2	Pengembangan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	17.133.190.000	
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	1.500.000.000	2 Unit	5.000.000.000	
3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	30 Unit	5.000.000.000	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	30 Unit	2.900.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif (Rp)
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	3.150.000.000	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	2.000.000.000	5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	2.000.000.000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	20.000.000.000	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	5.000.000.000	
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	50 Unit	200.000.000	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	50 Unit	373.780.670	
8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	15.000.000.000	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	9.000.000.000	
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	15 Paket	300.000.000	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	15 Paket	300.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	69.413.000.000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	62.936.021.000	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5728 Orang	2.000.000.000	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5728 Orang	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif (Rp)
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5467 Orang	2.000.000.000	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5467 Orang	100.000.000	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5085 Orang	363.000.000	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5085 Orang	100.000.000	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25214 Orang	400.000.000	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25214 Orang	100.000.000	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48956 Orang	330.000.000	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48956 Orang	2.500.000.000	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255954 Orang	300.000.000	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255954 Orang	100.000.000	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78323 Orang	330.000.000	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78323 Orang	100.000.000	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116510 Orang	300.000.000	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116510 Orang	100.000.000	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4146 Orang	300.000.000	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4146 Orang	100.000.000	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	578 Orang	300.000.000	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	578 Orang	100.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4627 Orang	300.000.000	20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4627 Orang	100.000.000	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7625 Orang	300.000.000	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7625 Orang	100.000.000	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1.000.000.000	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0	
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	3.500.000.000	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.261.421.000	
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	300.000.000	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0	
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.000.000.000	25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	500.000.000	
26	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	700.000.000	26	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	150.000.000	
27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	400.000.000	27	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	400.000.000	
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang	370.000.000	28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
29	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	700.000.000	29	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	100.000.000	
30	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	45.000.000.000	30	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	40.329.600.000	
31	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000	31	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000	
32	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	36 Unit	520.000.000	32	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		0	
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	5.000.000.000	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	14.495.000.000	
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	400.000.000	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	400.000.000	
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	400.000.000	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	100.000.000	
36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	1 Unit	1.000.000.000	36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan		0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
37	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	300.000.000	37	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0	
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	300.000.000	38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	300.000.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	220.000.000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	250.000.000	
39	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	220.000.000	39	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	250.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	4.800.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	300.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90 %	4.300.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90 %	-	
40	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	4.000.000.000	40	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	200 Orang	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
41	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000	41	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	-	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	500.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	300.000.000	
42	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	268 Orang	500.000.000	42	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	268 Orang	300.000.000	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90 %	1.600.000.000		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90 %	200.000.000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 %	600.000.000		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 %	100.000.000	
43	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	600.000.000	43	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	100.000.000	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90 %	600.000.000		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0%	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
44	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	600.000.000	44	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0 Dokumen	-	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90 %	400.000.000		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90 %	100.000.000	
45	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	75 Unit	400.000.000	45	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	75 Unit	100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90 %	652.600.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	182.600.000		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
46	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	182.600.000	46	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	140.000.000		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
47	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	140.000.000	47	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	330.000.000		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
48	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	330.000.000	48	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	98.592.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	90.504.772.330	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	240.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	129.215.000	
49	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	240.000.000	49	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	129.215.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	90.250.000.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	84.435.571.625	
50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1192 Orang/bulan	90.000.000.000	50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1192 Orang/bulan	84.435.571.625	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
51,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250.000.000	51,	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	300.000.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	50.000.000	
52,	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	300.000.000	52,	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	250.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	63.000.000	
53,	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	53,	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	
54,	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	54,	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	63.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	705.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	614.035.000	
55,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000	55,	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	299.135.000	
56,	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	56,	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.950.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif (Rp)
57,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	57,	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.950.000	
58,	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	58,	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.000.000	
59,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	59,	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	4.944.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 %	796.760.660	
60,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	484.000.000	60,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
61,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	350.000.000	61,	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
62,	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	3.110.000.000	62,	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	300.000.000	
63,	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	500.000.000	63,	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	146.760.660	
64,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	500.000.000	64,	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	350.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target		Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1.110.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	3.602.940.045	
65,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	65,	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.149.380.500	
66,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	500.000.000	66,	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	443.559.545	
67,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	67,	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	793.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	813.250.000	
68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	297.000.000	68	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	297.000.000	
69	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	56.000.000	69	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	50.250.000	
70	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	440.000.000	70	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	466.000.000	
	PUSKESMAS PADAHERANG				4.040.000.000		PUSKESMAS PADAHERANG				5.000.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.040.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.000.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	4.040.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	5.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	4.040.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	5.000.000.000	
71	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		4.040.000.000	71	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		5.000.000.000	
	PUSKESMAS SINDANGWANGI				1.830.000.000		PUSKESMAS SINDANGWANGI				2.200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.830.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.830.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.200.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.830.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.200.000.000	
72	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.830.000.000	72	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.200.000.000	
	PUSKESMAS MANGUNJAYA				2.950.000.000		PUSKESMAS MANGUNJAYA				3.750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.950.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.750.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.950.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.750.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.950.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.750.000.000	
73	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.950.000.000	73	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.750.000.000	
	PUSKESMAS KALIPUCANG				3.800.000.000		PUSKESMAS KALIPUCANG				4.500.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.800.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.500.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.800.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	4.500.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.800.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	4.500.000.000	
74	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.800.000.000	74	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		4.500.000.000	
	PUSKESMAS PANGANDARAN				6.000.000.000		PUSKESMAS PANGANDARAN				7.400.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.000.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.400.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	6.000.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	7.400.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	6.000.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	7.400.000.000	
75	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		6.000.000.000	75	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		7.400.000.000	
	PUSKESMAS SIDAMULIH				1.540.000.000		PUSKESMAS SIDAMULIH				1.440.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.540.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.440.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	240.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	240.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	240.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	240.000.000	
76	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	240.000.000	76	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	30 Orang	240.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.300.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.200.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.300.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.200.000.000	
77	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.300.000.000	77	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.200.000.000	
	PUSKESMAS CIKEMBULAN				2.332.000.000		PUSKESMAS CIKEMBULAN				2.960.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.332.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.960.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	460.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	460.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	460.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	460.000.000	
78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	59 Orang	460.000.000	78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	59 Orang	460.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.872.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.500.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.872.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.500.000.000	
79	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.872.000.000	79	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.500.000.000	
	PUSKESMAS PARIGI				3.640.000.000		PUSKESMAS PARIGI				4.800.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.640.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.800.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.640.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	4.800.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.640.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	4.800.000.000	
80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.640.000.000	80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		4.800.000.000	
	PUSKESMAS SELASARI				1.308.000.000		PUSKESMAS SELASARI				1.308.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.308.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.308.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	158.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	158.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	158.000.000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%	158.000.000	
78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	158.000.000	78	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	158.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.150.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	1.150.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.150.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.150.000.000	
79	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.150.000.000	79	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.150.000.000	
	PUSKESMAS CIJULANG				3.020.000.000		PUSKESMAS CIJULANG				4.500.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.020.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.500.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.020.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	4.500.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA						DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.020.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	4.500.000.000,00	
80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.020.000.000	80	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		4.500.000.000,00	
	PUSKESMAS CIMERAK				2.448.000.000		PUSKESMAS CIMERAK				2.448.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.448.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.448.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.448.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.448.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.448.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.448.000.000	
81	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.448.000.000	81	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.448.000.000	
	PUSKESMAS LEGOKJAWA				2.400.000.000		PUSKESMAS LEGOKJAWA				2.400.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.400.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.400.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.400.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.400.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.400.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.400.000.000	
81	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.400.000.000	81	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.400.000.000	
	PUSKESMAS CIGUGUR				2.650.000.000		PUSKESMAS CIGUGUR				2.650.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.650.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.650.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.650.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.650.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.650.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.650.000.000	
82	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.650.000.000	82	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.650.000.000	
	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR				3.250.000.000		PUSKESMAS LANGKAPLANCAR				3.250.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.250.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.250.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.250.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	3.250.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.250.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	3.250.000.000	
83	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.250.000.000	83	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		3.250.000.000	
	PUSKESMAS JADIKARYA				2.150.000.000		PUSKESMAS JADIKARYA				2.150.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.150.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.150.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.150.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	2.150.000.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.150.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	2.150.000.000	
84	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.150.000.000	84	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		2.150.000.000	
	RSUD PANDEGA PANGANDARAN				139.500.000.000		RSUD PANDEGA PANGANDARAN				132.500.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				139.500.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				132.500.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	DENGAN PELAYANAN DASAR						DENGAN PELAYANAN DASAR					
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90 %	32.000.000.000		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90 %	17.500.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %	28.000.000.000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90 %	17.500.000.000	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.000.000.000		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	10.000.000.000		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	6.500.000.000	
	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	8.000.000.000		Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	11.000.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	4.000.000.000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %	0	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	4.000.000.000		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	107.500.000.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %	115.000.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	107.500.000.000		Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	115.000.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	107.500.000.000		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	115.000.000.000	

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak saja didasarkan pada mekanisme top-down, akan tetapi juga melalui mekanisme bottom-up. Proses perencanaan melalui mekanisme bottom-up dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.

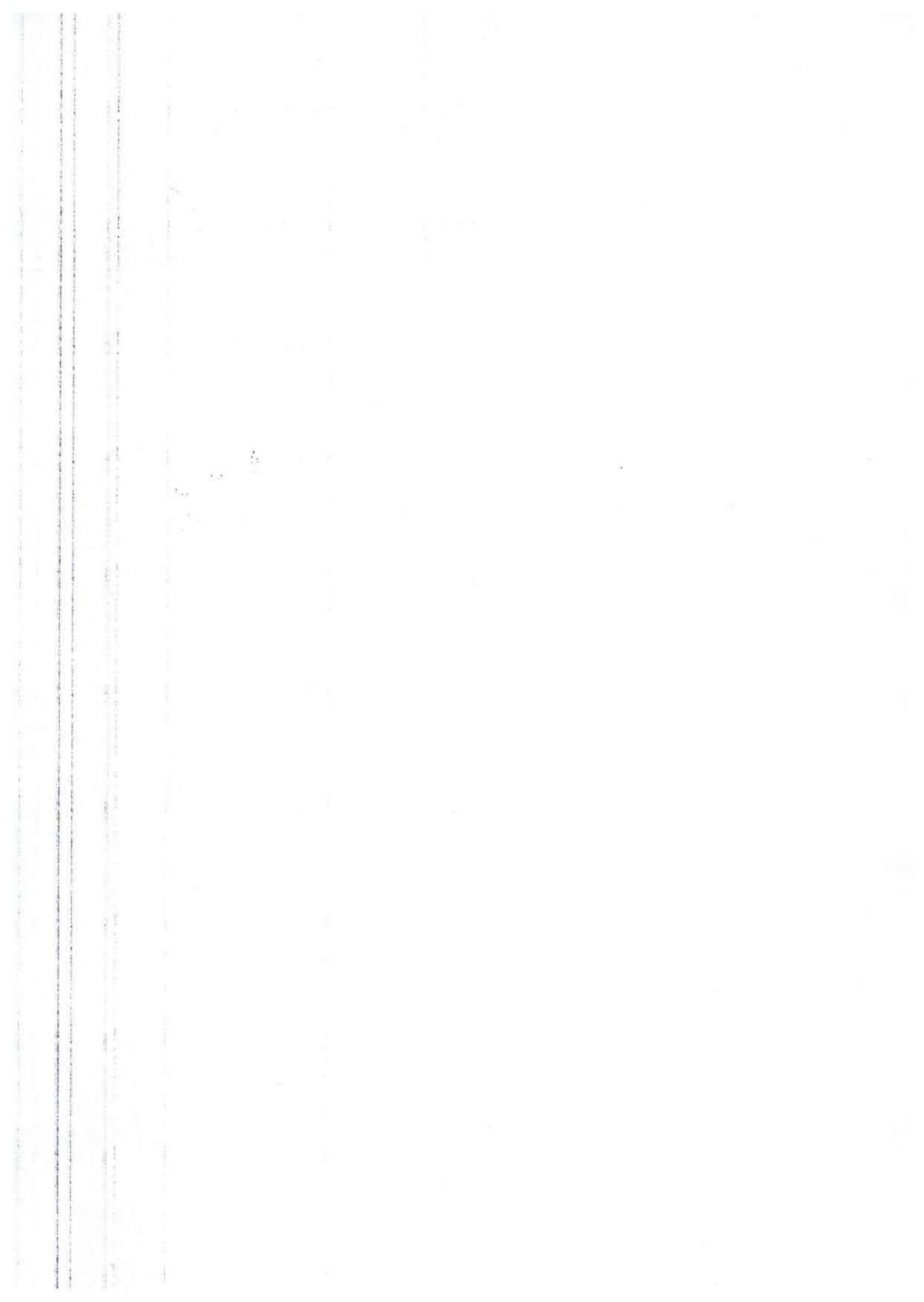
Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti LMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda secara aktif memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk pembangunan kesejahteraan kesehatan masyarakat desa. Demikian juga ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Dalam pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Pangandaran selalu menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan rencana kerja disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat, dimana aspirasi tersebut tertuang dalam pokok-pokok pikiran dewan. Berikut ini adalah daftar usulan kegiatan dari pikir dewan di tahun 2025, diantaranya:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

**Dinas Kesehatan
Kabupaten Pangandaran**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Desa Putrapinggan, Kec. Kalipucang Desa Margacinta, Kec. Cijulang Desa Kersaratu, Kec. Sidamulih Desa Sidamulih, Kec. Sidamulih Desa Kertaharja, Kec. Cimerak Desa Maruyungsari, Kec. Padaherang Desa Panyutran, Kec. Padaherang Desa Cijulang, Kec. Cijulang	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	8 Unit	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bangsa Indonesia yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.1 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi dari Presiden Republik Indonesia ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Memiliki 9 (tujuh) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

3.1.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi

Visi Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat".

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:

"Akselerator Pencapaian Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri untuk Hidup Sehat"

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, kemauan, motivasi, etos kerja yang tinggi, dan menguasai teknologi untuk menjadi pendorong, penggerak, fasilitator dan advocator untuk terjadinya akselerasi pembangunan kesehatan di Jawa Barat. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, sehingga masyarakat Jawa Barat yang mandiri untuk hidup sehat dapat segera tercapai, dan masyarakat Jawa Barat menjadi sehat. Untuk mencapai visi Dinas Kesehatan Provinsi tersebut ditetapkan melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.
3. Meningkatkan Sistem Surveillance dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.

3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran

Visi Kabupaten Pangandaran 2021-2026: ***"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa"***

MISI :

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2021-2026) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah maka Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
- 2) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
- 3) Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
- 4) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
- 5) mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;

- 6) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3.1.4 Strategis dan Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

Untuk mendukung Pangandaran sehat adalah:

Strategis 1:

Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan

Arah Kebijakan:

- a. Optimalisasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis bagi masyarakat pangandaran.
- b. Meningkatkan gizi anak dan layanan kesehatan terhadap ibu dan anak.
- c. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulan 24 jam.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian obat dan makanan.

Strategis 2:

Peningkatan standar pelayanan kesehatan

Arah kebijakan:

- a. Meningkatkan mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Strategis 3:

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan:

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.
- b. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Kabupaten Pangandaran).
- c. Menjamin ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Kesehatan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan selama satu tahun kedepan.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran 2021-2026 ke dalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan di Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran terurai sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Sasaran 1 : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Sasaran 1 : Nilai AKIP SKPD

Sasaran 2 : Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indikator sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan

Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran 3 :

- Indeks Kesehatan
- Angka Kematian Ibu (AKI)
- Angka Kematian Bayi (AKB)
- Persentase Kecamatan Siap Siaga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah/KLB

Sasaran 4 : Meningkatnya Standar Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran 4 :

- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi
- Peningkatan Status Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran 5 :

- Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
- Rumah Sakit yang dibangun
- Persentase pelayanan kesehatan yang menerapkan system informasi kesehatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Jumlah program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan untuk pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Pendapatan dan Pembiayaan

No	Uraian	Pendapatan	Pembiayaan	Jumlah	Ket
1	Dinas Kesehatan	310.000.000	-	310.000.000	Labkesda
2	Puskesmas Padaherang	5.000.000.000	-	5.000.000.000	
3	Puskesmas Sindangwangi	2.200.000.000	-	2.200.000.000	
4	Puskesmas Mangunjaya	3.750.000.000	-	3.750.000.000	
5	Puskesmas Kalipucang	4.500.000.000	-	4.500.000.000	
6	Puskesmas Pangandaran	7.400.000.000	500.000.000	7.900.000.000	
7	Puskesmas Sidamulih	1.393.680.000	-	1.393.680.000	
8	Puskesmas Cikembulan	2.300.000.000	-	2.300.000.000	
9	Puskesmas Parigi	4.700.000.000	-	4.700.000.000	
10	Puskesmas Selasari	1.041.090.720	-	1.041.090.720	
11	Puskesmas Cijulang	3.868.200.000	150.000.000	4.018.200.000	
12	Puskesmas Cimerak	2.387.876.474	-	2.387.876.474	
13	Puskesmas Legokjawa	2.286.000.000	-	2.286.000.000	
14	Puskesmas Cigugur	2.470.000.000	-	2.470.000.000	
15	Puskesmas Langkaplancar	2.930.542.265	-	2.930.542.265	
16	Puskesmas Jadikarya	2.503.000.000	-	2.503.000.000	
17	RSUD Pandega	72.000.000.000	14.000.000.000	86.000.000.000	
	Total	121.040.389.459	14.650.000.000	135.690.389.459	

B. Rencana Kerja dan Pendanaan

Terlampir

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN -
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						201.897.764.000,00							177.588.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						201.897.764.000,00							177.588.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						201.897.764.000,00							177.588.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90 %			90 %	90.504.772.330,00						90 %	97.408.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %	129.215.000,00					DINKES Pangandaran	100 %	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	129.215.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	84.435.571.625,00					DINKES Pangandaran	100 %	90.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1192 Orang/bulan	84.435.571.625,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINKES Pangandaran		90.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			100 %	50.000.000,00					DINKES Pangandaran	100 %	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %			100 %	63.000.000,00					DINKES Pangandaran	100 %	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	350.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %			90 %	3.602.940.045,00			-	-	DINKES Pangandaran	90 %	1.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat:														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	443.559.545,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.149.380.500,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %			90 %	813.250.000,00			-	-	DINKES Pangandaran	90 %	793.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	297.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		297.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	50.250.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	466.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	DINKES Pangandaran		440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90 %			90 %	110.892.991.670,00						90 %	79.080.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	9.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku a t Pembang uan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				15 Paket	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t Pembang uan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Pengguna Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0050		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Masyarakat Penerima Layanan UKM dan UKP		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			90 %	250.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON RISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %			90 %	300.000.000,00						90 %	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 %			90 %	300.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	SDM Kesehatan	90 %	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				268 Orang	300.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	SDM Kesehatan		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90 %			90 %	200.000.000,00						90 %	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 %			90 %	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT	90 %	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal serta UMOT		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 %			90 %	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Industri Rumah Tangga Penghasil Produk Pangan dan Minuman	90 %	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkatan Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Industri Rumah Tangga Penghasil Produk Pangan dan Minuman		0,00	DINAS KESEHATAN
			JUMLAH					201.897.764.000,00							177.586.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PADAHERANG KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PADAHERANG						5.000.000.000,00							4.040.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.000.000.000,00							4.040.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.000.000.000,00							4.040.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90 %			90 %	5.000.000.000,00						90 %	4.040.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	5.000.000.000,00			-	-	Puskesmas Padaherang	100 %	4.040.000.000,00	PUSKESMAS PADAHERANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Padaherang		4.040.000.000,00	PUSKESMAS PADAHERANG
		J U M L A H						5.000.000.000,00							4.040.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SINDANGWANGI KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SINDANGWANGI						2.200.000.000,00							1.830.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.200.000.000,00							1.830.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.200.000.000,00							1.830.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90 %			90 %	2.200.000.000,00						90 %	1.830.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.200.000.000,00				Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Puskesmas Sindangwangi	100 %	1.830.000.000,00	PUSKESMAS SINDANGWANGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.200.000.000,00	Kab. Pangandaran, Padarherang, Sindangwangi	PENDAPATAN DARI BLUD		Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Puskesmas Sindangwangi		1.830.000.000,00	PUSKESMAS SINDANGWANGI
		J U M L A H						2.200.000.000,00							1.830.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS MANGUNJAYA KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS MANGUNJAYA						3.750.000.000,00							2.950.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.750.000.000,00							2.950.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.750.000.000,00							2.950.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %			90 %	3.750.000.000,00						90 %	2.950.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	3.750.000.000,00			-	-	Puskesmas Mangunjaya	100 %	2.950.000.000,00	PUSKESMAS MANGUNJAYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.750.000.000,00	Kab. Pangandaran, Mangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Mangunjaya		2.950.000.000,00	PUSKESMAS MANGUNJAYA
		J U M L A H						3.750.000.000,00							2.950.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS KALIPUCANG KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS KALIPUCANG						4.500.000.000,00							3.800.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.500.000.000,00							3.800.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.500.000.000,00							3.800.000.000,00	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %			90 %	4.500.000.000,00						90 %	3.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	4.500.000.000,00			-	-	Puskesmas Kalipucang	100 %	3.800.000.000,00	PUSKESMAS KALIPUCANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Kalipucang		3.800.000.000,00	PUSKESMAS KALIPUCANG
		JUMLAH						4.500.000.000,00							3.800.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PANGANDARAN KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PANGANDARAN						7.400.000.000,00							6.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.400.000.000,00							6.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						7.400.000.000,00							6.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	7.400.000.000,00						90 %	6.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	7.400.000.000,00			-	-	Puskesmas Pangandaran	100 %	6.000.000.000,00	PUSKESMAS PANGANDARAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Pangandaran		6.000.000.000,00	PUSKESMAS PANGANDARAN
		J U M L A H						7.400.000.000,00							6.000.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SIDAMULIH KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SIDAMULIH						1.233.600.000,00							1.300.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.233.600.000,00							1.300.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.233.600.000,00							1.300.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90 %			90 %	1.233.600.000,00						90 %	1.300.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	1.233.600.000,00			-	-	Puskesmas Sidamulih	100 %	1.300.000.000,00	PUSKESMAS SIDAMULIH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.233.600.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Sidamulih		1.300.000.000,00	PUSKESMAS SIDAMULIH
		J U M L A H						1.233.600.000,00							1.300.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS CIKEMBULAN KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS CIKEMBULAN						2.721.800.000,00							1.872.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.721.800.000,00							1.872.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.721.800.000,00							1.872.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	2.721.800.000,00						90 %	1.872.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.721.800.000,00					Puskesmas Cikembulan	100 %	1.872.000.000,00	PUSKESMAS CIKEMBULAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.721.800.000,00	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cikembulan		1.872.000.000,00	PUSKESMAS CIKEMBULAN
		JUMLAH							2.721.800.000,00						1.872.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS PARIGI KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS PARIGI						4.800.000.000,00							3.640.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.800.000.000,00							3.640.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.800.000.000,00							3.640.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	4.800.000.000,00						90 %	3.640.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	4.800.000.000,00			-	-	Puskesmas Parigi	100 %	3.640.000.000,00	PUSKESMAS PARIGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.800.000.000,00	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Parigi		3.640.000.000,00	PUSKESMAS PARIGI
		JUMLAH						4.800.000.000,00							3.640.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS SELASARI KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS SELASARI						1.165.200.000,00							1.150.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.165.200.000,00							1.150.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.165.200.000,00							1.150.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	1.165.200.000,00						90 %	1.150.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	1.165.200.000,00			-	-	Puskesmas Selasari	100 %	1.150.000.000,00	PUSKESMAS SELASARI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.165.200.000,00	Kab. Pangandaran, Pangl. Selasari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Selasari		1.150.000.000,00	PUSKESMAS SELASARI
		JUMLAH						1.165.200.000,00							1.150.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS CIJULANG KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS CIJULANG						4.500.000.000,00							3.020.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.500.000.000,00							3.020.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.500.000.000,00							3.020.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	4.500.000.000,00						90 %	3.020.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	4.500.000.000,00			-	-	Puskesmas Cijulang	100 %	3.020.000.000,00	PUSKESMAS CIJULANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.500.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangajar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cijulang		3.020.000.000,00	PUSKESMAS CIJULANG
		J U M L A H						4.500.000.000,00							3.020.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS CIMERAK KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS CIMERAK						2.448.000.000,00							2.448.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.448.000.000,00							2.448.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.448.000.000,00							2.448.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	2.448.000.000,00						90 %	2.448.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.448.000.000,00			-	-	Puskesmas Cimerak	100 %	2.448.000.000,00	PUSKESMAS CIMERAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.448.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cimerak		2.448.000.000,00	PUSKESMAS CIMERAK
		JUMLAH						2.448.000.000,00							2.448.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LEGOKJAWA KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LEGOKJAWA						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	90 %			90 %	2.400.000.000,00						90 %	2.400.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.400.000.000,00			-	-	Puskesmas Legokjawa	100 %	2.400.000.000,00	PUSKESMAS LEGOKJAWA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.400.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Legokjawa		2.400.000.000,00	PUSKESMAS LEGOKJAWA
		JUMLAH						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS CIGUGUR KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS CIGUGUR						2.650.000.000,00							2.650.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.650.000.000,00							2.650.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.650.000.000,00							2.650.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90 %			90 %	2.650.000.000,00						90 %	2.650.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.650.000.000,00			-	-	Puskesmas Cigugur	100 %	2.650.000.000,00	PUSKESMAS CIGUGUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.650.000.000,00	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Cigugur		2.650.000.000,00	PUSKESMAS CIGUGUR
		J U M L A H						2.650.000.000,00							2.650.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS LANGKAPLANCAR KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PUSKESMAS LANGKAPLANCAR						3.250.000.000,00							3.250.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.250.000.000,00							3.250.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.250.000.000,00							3.250.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90 %			90 %	3.250.000.000,00						90 %	3.250.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	3.250.000.000,00			-	-	Puskesmas Langkaplancar	100 %	3.250.000.000,00	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.250.000.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Langkaplancar		3.250.000.000,00	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
		J U M L A H						3.250.000.000,00							3.250.000.000,00	

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PUSKESMAS JADIKARYA KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		PUSKESMAS JADIKARYA						2.150.000.000,00							2.150.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.150.000.000,00							2.150.000.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.150.000.000,00							2.150.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 %			90 %	2.150.000.000,00						90 %	2.150.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %			100 %	2.150.000.000,00			-	-	Puskesmas Jadikarya	100 %	2.150.000.000,00	PUSKESMAS JADIKARYA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.150.000.000,00	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Puskesmas Jadikarya		2.150.000.000,00	PUSKESMAS JADIKARYA	
		JUMLAH							2.150.000.000,00							2.150.000.000,00	

RSUD PANDEGA KAB. PANGANDARAN[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Peruanyang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				135 Unit	5.000.000.000,00	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperku s P pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Mlenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Peningkata n Kualitas dan Akses ibilitas Layanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		10.000.000.000,00	RSUD PANDEGA
			J U M L A H					120.000.000.000,00							117.500.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerja sama dan koordinasi antar esekretariat dan semua bidang,
2. Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator SPM. Oleh sebab itu, seluruh elemen kesehatan untuk bekerja lebih fokus untuk mencapai target SPM,
3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan,
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN serta menjadi dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kesehatan,

5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ memedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Pangandaran dan Renstra Dinas Kesehatan).
6. Renja SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2025, dengan 5 Program 16 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi.

Rencana tindak lanjut transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat;
2. Terbangunnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak;
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan bidang kesehatan;
4. Mengaktifkan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya untuk berperilaku bersih dan sehat;
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Tahun 2025, dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2025 yang akan datang.